

ABSTRAK

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan mobilisasi dan penerimaan pajak kendaraan di daerahnya. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi harapan besar untuk terciptanya kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Taat Pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan alat bantu kuesioner dengan jumlah 26 pernyataan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan populasi dan sampel dari Wajib Pajak yang berada di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta dengan jumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan pengujian menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, korelasi dan uji hipotesis yaitu uji f, uji t serta koefisien determinasi dengan alat analisis SPSS Versi 22.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) Modernisasi Sistem Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap taat pajak karena nilai t hitung $1,900 <$ dari nilai kritis $1,985$, (2) Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap taat pajak karena nilai t hitung $3,933 >$ dari nilai kritis $1,985$, dan (3) Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap taat pajak karena nilai t hitung $-0,375 <$ dari nilai kritis $1,985$. Koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas hanya mampu menjelaskan sebesar $18,5\%$.

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak, Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Regional governments have an important role in maintaining the balance of mobilization and vehicle tax revenues in their regions. The various efforts made by the Regional Government provide great hope for achieving tax compliance. This research aims to determine whether there is an influence of Modernization of the Tax Administration System, Tax Sanctions and Motor Vehicle Tax Reduction Policy on Tax Compliance.

The method used in this research is a quantitative approach. This data collection technique uses a questionnaire with 26 statements. The type of data used is primary data with a population and sample of taxpayers at SAMSAT Bandung City III Soekarno Hatta with a total of 100 respondents. The sampling technique uses simple random sampling with testing using the classic assumption test, multiple linear regression, correlation and hypothesis testing, namely the f test, t test and coefficient of determination using the SPSS Version 22 analysis tool.

The test results show that (1) Modernization of the Tax Administration System has no effect on tax compliance because the calculated t value is $1.900 < 1.985$, (2) Tax Sanctions have a significant effect on tax compliance because the calculated t value is $3.933 > 1.985$, and (3) The Motor Vehicle Tax Reduction Policy has no effect on tax compliance because the calculated t value is $-0.375 < 1.985$. The coefficient of determination shows that the independent variable is only able to explain 18.5%.

Keywords: *Modernization of the Tax Administration System, Tax Sanctions, Motor Vehicle Tax Reduction Policy*